



**LAPORAN KINERJA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU
TAHUN 2021**

SIMAK  **BPK RI**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Maluku dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2021 dan disampaikan kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI dan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2021 disusun untuk memenuhi Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang pelaporan kinerja pada unit-unit kerja pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang mengamanatkan setiap pimpinan Eselon II wajib menyusun Laporan Kinerja yang merupakan dasar penyusunan Laporan Kinerja BPK. Laporan Kinerja satuan Kinerja Eselon II disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2021 menyajikan capaian evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam perjanjian kinerja. Pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis tersebut memuat informasi terkait capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, penjelasan yang memadai tentang hal-hal yang mendorong dan menghambat pencapaian target kinerja, penjelasan mengenai keluaran kinerja dikaitkan dengan pemanfaatan anggaran dan rencana aksi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, Perwakilan Provinsi Maluku berharap Laporan Kinerja Tahun 2021 ini dapat menjadi acuan perbaikan kinerja perwakilan di Tahun 2022. Dengan demikian, Perwakilan Provinsi Maluku akan terus melakukan perbaikan dalam kinerjanya secara efektif, efisien dan berkesinambungan, untuk mencapai rencana strategis BPK.

Ambon, 31 Januari 2022

Kepala Perwakilan,



Hery Purwanto S.E., M.M., Ak., CA, CSFA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI, SERTA ISU STRATEGIS	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN	6
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. CAPAIAN KINERJA	14
B. REALISASI ANGGARAN.....	26
BAB IV	
PENUTUP	30
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Berdasarkan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK RI dan penandatanganan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2021, perlu disusun suatu Laporan Pencapaian Kinerja. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, kendala yang dihadapi, dan usulan untuk mengatasi kendala tersebut.

Metode penilaian atas pencapaian kinerja dalam SIMAK BPK RI adalah membandingkan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) 2021. Laporan kinerja ini harus disampaikan kepada Auditorat Utama Keuangan Negara (Tortama KN) VI dengan tembusan kepada Kepala Direktorat

Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Tugas, Fungsi, serta Isu Strategis pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK mendirikan kantor perwakilan di tiap provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku dibuka pada tanggal 20 Desember 2006 dengan sebutan Kantor Perwakilan BPK RI di Ambon. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 pada pasal 744 juga menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku beradadi bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku, Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melakukan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. Saat ini BPK Perwakilan Provinsi Maluku memiliki 12 entitas pemeriksaan pemerintah daerah (1 pemerintah provinsi, 2 pemerintah kota, dan 9 pemerintah kabupaten).

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020–2024. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

- a. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di tahun 2019 sebesar 72,74% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 75%. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku perlu untuk meningkatkan koordinasi dengan entitas terkait permasalahan yang menghambat penyelesaian tindak lanjut.
- b. Masih adanya gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang berisiko menurunkan reputasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- c. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan;
- d. Jumlah jam pendidikan dan pelatihan (diklat) pemeriksa dan non pemeriksa belum memenuhi standar disebabkan jadwal pelaksanaan diklat yang seringkali bersamaan dengan jadwal pemeriksaan di Perwakilan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi evaluasi Perwakilan untuk mendorong pemeriksa dan non pemeriksa mengadakan *in house training* di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dengan membawahi tiga unit kerja sebagai berikut:

A. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

B. Subauditorat Maluku I

Subauditorat Maluku I mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a. merumuskan rencana kegiatan;
- b. mengusulkan tim pemeriksa;
- c. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan

oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- h. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

C. Subauditorat Maluku II

Subauditorat Maluku II mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a. merumuskan rencana kegiatan;
- b. mengusulkan tim pemeriksa;
- c. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- j. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

D. Maksud dan Tujuan Pelaporan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2021 yaitu menyampaikan pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam perjanjian kinerja yaitu Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun 2021. Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2021 menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) satuan Kerja eselon II
2. Realisasi pencapaian target kinerja Unit Kerja Eselon II
3. Penjelasan yang memadai tentang hal-hal yang mendorong dan menghambat pencapaian target kinerja
4. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis BPK
5. Penjelasan mengenai keluaran kinerja dikaitkan dengan pemanfaatan anggaran (penganggaran berbasis kinerja), dan
6. Rencana aksi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2020 telah disepakati oleh Kepala Perwakilan dan Tortama KN VI yang dituangkan dalam PKPK 2021. Adapun rincian Sasaran Strategis (SS), dan target Indikator Kinerja Unit (IKU), dan Target Indikator Kinerja Keluaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian sasaran strategis (SS) dan Target IKU 2021

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp33.468.338.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	Rp10.237.229.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp23.231.109.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87,50%

Tabel 2 Rincian sasaran strategis (SS) dan Target IKK 2021

Sasaran Kegiatan dan Sasaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%
		LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%
		Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%
		Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%
		Laporan Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%
		Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%
		Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Manajemen Internal Perwakilan
Layanan Sarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor			1 Paket
Layanan Perkantoran	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan			95%
	Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor			95%

Target IKU Tahun 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku meliputi 13 IKU yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling. Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.
2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai

dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.
6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.
7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Skala hasil survei:
 - a. 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
 - b. 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
 - c. 3,00 - 3,99 = memuaskan
 - d. 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Anaystic). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan. Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun

BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Skala hasil survei:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi diatur sebagai berikut:

- 1) Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
- 2) Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014)
- 3) Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung

jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tuisi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

13. IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- 1) Penyerapan anggaran
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- 3) Pencapaian keluaran
- 4) Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan SIMAK periode Triwulan IV Tahun 2021 meliputi 13 IKU, dimana Perwakilan mendapatkan skor IKU keseluruhan 98,11. Berikut adalah rincian pencapaian IKU yang dimaksud:

Tabel 3
Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021
(1)	(2)	(3)	
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	88,46%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	69,40%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,45%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,53%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,44
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	87,86
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,71%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,98
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	97,37%
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	86,01%

No	Indikator Kinerja Keluaran	Target 2021	Realisasi 2021
(1)	(2)	(3)	
1	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	100%
2	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%	100%
3	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	100%
4	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	100%
5	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	100%
6	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%
7	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%	100%
8	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%	100%

No	Indikator Kinerja Keluaran	Target 2021	Realisasi 2021
(1)	(2)	(3)	
9	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%	100%
10	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100%	100%
11	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket	3 Paket
12	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	92,81%
13	Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%	98,10%

1. Perbandingan antara target dan realisasi IKU Tahun 2021 ini

Adapun capaian kinerja, evaluasi dari masing-masing sasaran strategis akan diuraikan dibawah ini.

a. IKU 1 (Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan)

Quality Control (QC) dan *Quality Assurance* (QA) pemeriksaan dilaksanakan setelah pemeriksaan selesai. Sampai dengan akhir Triwulan IV 2021 pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2020 telah selesai dilaksanakan, dimana QA dan QC seluruhnya dilaksanakan pada 12 pemeriksaan LKPD TA 2020. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menyelesaikan 5 Pemeriksaan Kinerja dan 4 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada tahun 2021, dimana QA dan QC juga telah dilaksanakan seluruhnya pada 9 pemeriksaan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat EPP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan skor sebesar 83,34%, dimana skor tersebut didapat dari Tingkat Konsistensi atas LHP sebesar 53,85%, dan Tingkat Akurasi atas LHP sebesar 92,31%. Selain itu, hasil reuiu Inspektorat Utama yang merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan skor penilaian sebesar 100%. Capaian-capaian tersebut menghasilkan skor IKU 1 sebesar 88,46%. Realisasi tersebut belum memenuhi target tahunan yaitu 100%.

b. IKU 2 (Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan)

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku adalah 100%. Realisasi tersebut telah memenuhi target 2021 yaitu 100%.

c. IKU 3 (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan)

Pemantauan TLRHP pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah dilaksanakan pada tanggal 30 November s.d 4 Desember 2020 sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Nomor 229/ST/XIX.AMB/11/2021 tanggal 29 November 2021. Sampai dengan Laporan IKU Triwulan IV Tahun 2021 disusun, realisasi penyelesaian TLRHP Triwulan IV tahun 2021 adalah sebesar 69,40 %, dengan rincian: 9.039 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti; 3.179 rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti; 999 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; dan 436 rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti. Realisasi tersebut belum sesuai dengan target Tahun 2020 yaitu sebesar 75%.

d. IKU 4 (Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional)

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan 3 Pemeriksaan Tematik Nasional sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021. Realisasi ini sesuai dengan target RKP Tahun 2021 yaitu 3.

e. IKU 5 (Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan)

Belum terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2021, sehingga tingkat pemenuhan pemeriksaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 masih sebesar 100%, sesuai dengan target tahunan.

f. IKU 6 (Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal)

Pemeriksaan Tematik Lokal sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan, dimana Pemeriksaan Tematik Nasional berjumlah 3. Realisasi ini sesuai dengan target RKP Tahun 2020 yaitu 3.

g. IKU 7 (Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK)

Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar bagi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku menunjukkan skor sebesar 4,44. Realisasi ini belum sesuai dengan target Tahun 2020 yaitu 5,00.

h. IKU 8 (Hasil Evaluasi AKIP)

Evaluasi AKIP yang bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BPK RI. Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 418/ND/XI/09/2021 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan nilai sebesar 87,86 dengan predikat A (Memuaskan). Realisasi ini telah sesuai dengan target tahunan yaitu sebesar 87,00 dengan predikat A (Memuaskan).

i. IKU 9 (Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi)

Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi berdasarkan data dari Biro TI sampai dengan Triwulan IV 2020 adalah sebesar 98,71%, yang dapat dirinci sebagai berikut: tingkat pemanfaatan layanan dasar sebesar 100%, tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum sebesar 94,85%, tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan sebesar 100%, dan tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan sebesar 100%. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari target tahun 2021 yakni sebesar 96%.

j. IKU 10 (Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan)

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah membuat usulan atas *Best Practice* melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Maluku No. 313.a/ND/XIX.AMB/09/2021 yang berjudul Peningkatan Komitmen dan Penerapan Fungsi Pengawasan Peminjaman

Barang Milik Negara. BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga telah melaksanakan implementasi serta pelaporan penerapan *Best Practice* melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan No. 383/ND/XIX.AMB/11/2021 yang berjudul Penerapan Pengawasan Peminjaman BMN Melalui Sistem Aplikasi. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menyampaikan empat Laporan Pelaksanaan Aktivitas *Knowledge Management* yang terdiri dari aktivitas Pendidikan dan Pelatihan, *Coaching*, Bantuan Rekan Sejawat, serta Forum Berbagi Pengetahuan. Atas realisasi ketiga poin tersebut mendapatkan nilai 100%. Realisasi ini telah sesuai target tahun 2021 yaitu 100%.

k. IKU 11 (Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi)

Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan skor sebesar 3,98. Realisasi ini lebih tinggi dari target Tahun 2021 yaitu 3,80.

l. IKU 12 (Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi)

BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2020 pada Triwulan I Tahun 2021. Sampai dengan periode pelaporan IKU, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mencatat presentase pegawai yang memenuhi standar jam Diklat Pengembangan Kompetensi sebesar 97,37%, atau 74 dari 76 pegawai.. Persentase ini belum memenuhi target Tahun 2021 yaitu 100%.

m. IKU 13 (Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran)

Berdasarkan Hasil Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan IV Tahun 2021 yang dilakukan oleh Biro Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan nilai 86,01% dengan rincian: Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 82,23% dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 91,69%. Persentase ini sudah belum memenuhi target Tahun 2021 yaitu 87,50%.

2. Perbandingan antara target dan realisasi IKK Tahun 2021

Adapun capaian kinerja, evaluasi dari masing-masing sasaran strategis akan diuraikan dibawah ini.

a. **IKK 1 (Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan)**

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan 12 Pemeriksaan LKPD, 5 Pemeriksaan Kinerja, dan 4 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Keseluruhan LHP atas pemeriksaan tersebut telah disampaikan tepat waktu, sehingga ketepatan waktu penyampaian LHP Tahun 2021 adalah 100%. Realisasi ini telah sesuai dengan target tahun 2021.

b. **IKK 2 (Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik)**

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik pada 12 entitas di wilayah Provinsi Maluku dengan output 119 laporan. Keseluruhan LHP atas pemeriksaan tersebut telah disampaikan tepat waktu, akan tetapi belum sesuai target realisasi yaitu 130 LHP.

c. **IKK 3 (Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat)**

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menyampaikan satu usulan bahan pendapat kepada Kepala Direktorat EPP melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan No. 331/ND/XIX.AMB/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang berjudul Pengenaan Tarif PPH Pasal 21 untuk Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penghasilan yang Bersumber dari APBD. Atas usulan tersebut, Kepala Direktorat EPP telah menerbitkan hasil kajian dan menyetujui usulan bahan pendapat tersebut melalui Nota Dinas Kepala Direktorat EPP No. 591/ND/XII.2/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021.

d. **IKK 4 (Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP)**

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah merealisasikan dua sumbangan IHPS pada Tahun 2021, yang direalisasikan pada tiap semesternya. Realisasi ini telah sesuai dengan target tahunan Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP sebesar 100%.

e. IKK 5 (Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas)

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah merealisasikan dua sumbangan IHPS pada Tahun 2021, yang direalisasikan pada tiap semesternya. Realisasi ini telah sesuai dengan target tahunan Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP sebesar 100%.

f. IKK 6 (Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada semester I dan II. Atas kegiatan pemantauan tersebut, telah direalisasikan 24 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada 12 entitas pemeriksaan. Atas realisasi tersebut, tingkat pemutakhiran data adalah 100%.

g. IKK 7 (Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah)

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada semester I dan II. Atas kegiatan pemantauan tersebut, telah direalisasikan 24 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada 12 entitas pemeriksaan. Laporan tersebut telah diterbitkan dan diinput pada aplikasi SIKAD pada bulan Juli dan Desember. Atas realisasi tersebut, tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah adalah 100%.

h. IKK 8 (Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan)

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan pemeriksaan interim pada 12 pemeriksaan LKPD dan 5 pemeriksaan kinerja. Laporan Hasil Pemeriksaan Interim diterbitkan setelah pemeriksaan interim dilaksanakan yaitu bulan Maret dan September 2021. Atas realisasi tersebut, Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan pada tahun 2021 adalah 100%.

i. IKK 9 (Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan)

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaporkan Laporan Manajemen Pemeriksaan bersamaan dengan laporan bulanan. Laporan

tersebut disusun dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Atas realisasi tersebut, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan adalah 100%.

j. IKK 10 (Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan)

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku melaporkan Laporan Manajemen Internal bersamaan dengan laporan bulanan. Laporan tersebut disusun dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Atas realisasi tersebut, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal adalah 100%.

k. IKK 11 (Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor)

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku merealisasikan 3 kendaraan bermotor. Realisasi tersebut telah sesuai dengan target tahunan

l. IKK 12 (Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan)

Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan tahun 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku adalah 92,81%. Realisasi tersebut masih belum sesuai dengan target tahunan yaitu 95%.

m. IKK 13 (Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor)

Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor tahun 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku adalah 98,10%. Realisasi tersebut telah sesuai dengan target tahunan yaitu 95%.

3. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Maluku mengalami fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan skor capaian kinerja IKU pada Tahun 2016 sebesar 98,67, kemudian meningkat di Tahun 2017 sebesar 100,52. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 87,41. Pada tahun 2019, Perwakilan Maluku kembali dapat meningkatkan skor capaian IKU menjadi 92,03. Skor IKU tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Kembali meningkat

menjadi sebesar 98,97. Pada akhirnya, skor IKU tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 98,11.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara keseluruhan BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah mencapai target kinerja pada Tahun 2021. Adapun keberhasilan ini dapat dicapai karena adanya arahan dari pimpinan di BPK Pusat dan kerja sama antar pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja yang memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 9 indikator, yaitu IKU 2 terkait Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal, IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP, IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, dan IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.

Adapun beberapa capaian kinerja yang tidak tercapai beserta analisa penyebab penurunan kinerja sebanyak 4 indikator, yaitu IKU 1, IKU 3, IKU 7, IKU 12, dan IKU 13. Penjelasan atas indikator signifikan yang menyebabkan penurunan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan belum memenuhi target yang ditetapkan. Kekurangan ini disebabkan oleh evaluasi Direktorat EPP atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang hanya mendapatkan nilai 76,92%. Bila dirinci lebih lanjut, kekurangan nilai tersebut disebabkan oleh penilaian tingkat konsistensi atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang hanya mendapatkan nilai 53,85%, dan penilaian tingkat akurasi atas LHP yang hanya mendapatkan nilai 92,31%. Atas kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan terus melakukan reviu LHP secara berjenjang,

mendorong pegawai untuk lebih memperhatikan konsistensi penulisan LHP, serta akan melakukan revidi redaksional atas konsep LHP sebelum diterbitkan.

IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan belum mencapai target yang disebabkan beberapa entitas yang masih sangat minim dalam menindaklanjuti rekomendasi, sehingga sangat berpengaruh pada persentase keseluruhan. Atas kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan meningkatkan koordinasi dengan entitas-entitas di Provinsi Maluku agar masalah-masalah yang menghambat penyelesaian Tindak Lanjut dapat diselesaikan.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar pada pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan nilai 4,44. Atas kekurangan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan terus mendorong pemahaman pegawai serta mensosialisasikan visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK RI.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi belum memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan jadwal diklat yang diselenggarakan Pusdiklat BPK RI sering bersamaan dengan jadwal penugasan lainnya. Selain itu, beberapa pegawai tidak memenuhi jam diklat disebabkan jadwal *in house training* yang diadakan BPK Perwakilan Provinsi Maluku bersamaan dengan penugasan dinas pegawai yang bersangkutan. Atas kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan tetap mengadakan *in house training* di Kantor Perwakilan Provinsi Maluku serta akan menghimbau para pegawai untuk melaksanakan diklat lebih awal sehingga tidak mengganggu penugasan atau cuti yang akan dilakukan.

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tidak mencapai target pada tahun 2021. Salah satu penyebab rendahnya Tingkat Kinerja Anggaran adalah masih minimnya nilai efisiensi dan konsistensi pada Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran. Atas kondisi tersebut,

pada tahun 2022 akan dilakukan rapat anggaran secara lebih rutin untuk dapat memonitor dan memperbaiki kekurangan yang masih menjadi permasalahan.

Atas kondisi tersebut di atas, Perwakilan Provinsi Maluku juga akan melakukan peningkatan capaian kinerja khususnya terhadap kegiatan Tahun 2021 yang tidak mencapai target yang ditetapkan dengan mendorong pejabat struktural dan fungsional agar lebih bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat meraih hasil yang lebih baik di Tahun 2022.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam meraih capaian kinerja Perwakilan Provinsi Maluku memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Perwakilan. Sumber daya tersebut bersumber dari anggaran perwakilan Sumber daya lain yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan adalah optimalisasi kinerja pegawai Perwakilan Provinsi Maluku dalam melaksanakan seluruh rencana kerja perwakilan selama satu tahun anggaran. Setiap pegawai mendapat pengarahan langsung dan jelas dari atasan langsung masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Perwakilan Provinsi Maluku pada Tahun 2021 merupakan usaha bersama serta sinergi antara pimpinan dan staf. Adapun beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka mencapai kinerja perwakilan antara lain sebagai berikut:

a. Pelaksanaan *in house training*

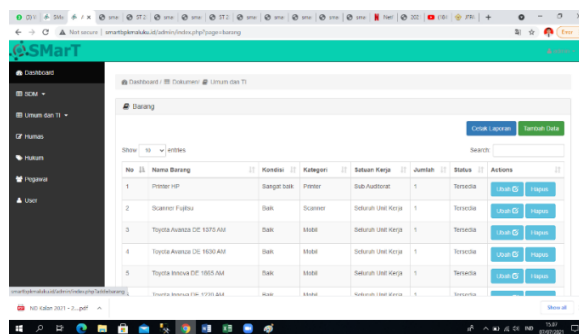
Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemeriksaan LKPD TA 2020, Perwakilan Provinsi Maluku melakukan *in house training* berupa rangkaian Diklat persiapan Pemeriksaan dengan berkoordinasi dengan Pusdiklat. Materi yang disampaikan terkait dengan teknik pemeriksaan infrastruktur, diklat penggunaan SiAP LK, serta diklat pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Pelaksanaan diklat pemeriksaan dilakukan dengan metode daring mengingat kondisi pandemic.



Gambar 1. Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD

b. Perancangan Aplikasi BMN

Dalam rangka memenuhi target Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku membuat usulan *Best Practice* yang berjudul Peningkatan Komitmen dan Penerapan Fungsi Pengawasan Peminjaman Barang Milik Negara. Pada saat ini, sesuai dengan tugas dan fungsi dan tanggung jawab Subbag Umum dan TI menunjukkan bahwa layanan-layanan sebagaimana mestinya yang diharapkan belum berjalan secara optimal dan belum didukung oleh kegiatan pengawasan serta pengendalian yang maksimal. Praktik ini dipertimbangkan sebagai best practice karena menghasilkan suatu kemudahan aksesibilitas pemberian layanan peminjaman BMN. Selain itu, fitur aplikasi memungkinkan satuan kerja untuk memantau dan menyimpan data BMN dalam rangka ketertiban pengelolaan BMN. Sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan best practice yaitu menjamin keamanan aset dan BMN, menjamin kondisi aset dan BMN dalam kondisi baik, dan meningkatkan kinerja dan kerja sama.



Gambar 2. Tampilan Aplikasi SMART BMN

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam meraih capaian kinerja yang telah disepakati antara Kepala Perwakilan Provinsi Maluku dengan Tortama KN VI, Perwakilan Provinsi Maluku telah mengupayakan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran Tahun 2021 selama masa pandemi *Covid-19*. Dalam rangka mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tahun 2021 yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku, sesuai dengan revisi DIPA Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Maluku memperoleh anggaran senilai Rp30.736.717.000,00. Anggaran tersebut terdiri dari Anggaran Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) senilai Rp9.536.461.000,00 dan anggaran Rencana Kerja Sekretariat dan Penunjang (RKSP) senilai Rp21.200.256.000,00. Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Berdasarkan RKP Tahun 2021, Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp9.536.461.000,00 sampai bulan Desember Tahun 2021, anggaran yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp9.391.821.056,00 atau sebesar 99,48%. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2021, yaitu:

Tabel 3 Realisasi RKP TA 2021

No.	Jenis Keluaran	Volume Keluaran (Output)				Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	Satuan	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Rumusan Bahan Pendapat	1	1	Laporan	100%	31.274.000	21.966.250	70,24
2.	Layanan Administrasi Pemeriksaan	12	12	Laporan	100%	1.454.725.000	1.376.496.397	94,62
3.	Sumbangan IHPS	2	2	Sumbangan IHPS	100%	157.806.000	149.252.763	94,58
4.	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku	32	32	Laporan	100%	4.311.283.000	4.267.978.133	99,00
6.	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Maluku	48	48	Laporan	100%	431.774.000	430.204.500	99,64
7.	Laporan Profil Entitas	12	12	Laporan	100%	15.808.000	12.911.173	81,67
8.	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Maluku	130	119	Laporan	100%	133.854.000	133.854.000	100,00
9.	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku	18	18	Laporan	100%	2.999.937.000	2.999.157.300	99,97

1. Rumusan Bahan Pendapat

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 1 output Rumusan Bahan Pendapat, yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp31.274.000,00. Namun sehubungan dengan kegiatan penyampaian bahan pendapat yang dibatasi secara daring diakibatkan pandemi Covid-19, penyerapan anggaran tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Realisasi Rumusan Bahan Pendapat adalah Rp21.966.250,00 atau 70,24%.

2. Layanan Administrasi Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 12 output layanan administrasi pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp1.454.725.000 dan realisasi sebesar Rp1.376.496.397 atau 94,62%. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target

3. Sumbangan IHPS

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 2 Sumbangan IHPS yang merupakan output keluaran semesteran, dengan anggaran sebesar Rp157.806.000 dan realisasi sebesar Rp149.252.763 atau 94,58%. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target.

4. LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 32 LHP yang terdiri dari pemeriksaan LKPD, Kinerja, dan PDTT, dengan anggaran sebesar Rp4.311.283.000 dan realisasi sebesar Rp4.267.978.133 atau 99,00%. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target.

5. Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Maluku

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 48 Laporan Pemantauan yang terdiri pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan kerugian daerah pada 12 entitas yang dilakukan setiap semester, dengan anggaran sebesar Rp431.774.000 dan realisasi sebesar Rp430.204.500 atau 99,64%. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target.

6. Laporan Profil Entitas

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 12 Laporan Profil Entitas, dengan anggaran sebesar Rp15.808.000 dan realisasi sebesar Rp12.911.173 atau 81,67%. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, namun sehubungan dengan kegiatan penyampaian bahan pendapat yang dibatasi secara daring diakibatkan pandemi Covid-19, penyerapan anggaran tidak dapat direalisasikan secara maksimal.

7. LHP atas Banparpol Perwakilan Provinsi Maluku

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 119 LHP Banparpol yang didasarkan atas pemeriksaan parpol pada 12 entitas di wilayah Provinsi Maluku, dengan anggaran sebesar Rp133.854.000 dan realisasi sebesar Rp133.854.000 atau 100%. Keluaran ini tidak sesuai dengan rencana (130 LHP) dikarenakan beberapa

parpol tidak menyerahkan LPJ Banparpol sehingga pemeriksaan atas Banparpol yang bersangkutan tidak bisa dilaksanakan.

8. LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 18 LHP Interim yang terdiri dari pemeriksaan LKPD, Kinerja, dan PDTT, dengan anggaran sebesar Rp2.999.937.000 dan realisasi sebesar Rp2.999.157.300 atau 99,97%. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target.

Sedangkan, berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat Pendukung (RKSP), BPK Perwakilan Provinsi Maluku memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp21.200.256.000,00. Sampai dengan bulan Desember Tahun 2021, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp20.524.523.186,00 atau sebesar 96,81%. Adapun berbagai output/keluaran yang telah dihasilkan sampai dengan bulan Desember dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Realisasi RKSP TA 2021

No.	Jenis Keluaran	Volume Keluaran (Output)				Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	Satuan	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Layanan Sekretariat Perwakilan	20	20	Laporan	100	Rp1.811.989.000,00	Rp1.794.849.571,00	99,05
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	34	34	Laporan	100	Rp10.649.750.000,00	Rp10.511.443.998,00	98,70
3.	Layanan Perkantoran	12	12	Bulan	100	Rp8.738.517.000,00	Rp8.218.229.617,00	94,05

1. Layanan Sekretariat Perwakilan

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 20 output Layanan Sekretariat Perwakilan dengan realisasi sebesar Rp1.794.849.571,00, yang terdiri dari output layanan pada masing-masing unit kerja di Sekretariat Perwakilan Provinsi Maluku. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target yaitu 99,05%.

2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menghasilkan 34 output layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan anggaran sebesar Rp10.511.443.998,00 dan realisasi sebesar Rp10.649.750.000,00 atau 94,62%. Output layanan tersebut terdiri dari pengadaan 3 kendaraan bermotor dan pengadaan 31 peralatan fasilitas perkantoran. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target.

3. Layanan Perkantoran

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah keluaran layanan perkantoran yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor dengan anggaran sebesar Rp8.218.229.617,00 dan realisasi sebesar Rp8.738.517.000,00 atau 94,62%. Realisasi gaji dan tunjangan adalah sebesar 92,81%, sedangkan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar 95,65%. Keluaran ini telah sesuai dengan rencana, dengan realisasi anggaran yang telah mendekati target.

BAB IV PENUTUP

Laporan Pengukuran Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku selama Tahun 2021 sekaligus evaluasi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Secara keseluruhan pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas sasaran strategis Tahun 2021 mencapai skor sebesar 97,99 dari target skor sebesar 100,00. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan, Perwakilan Provinsi Maluku telah mencapai target yang telah ditetapkan..

Selanjutnya, informasi pencapaian kinerja dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat bagi pimpinan BPK RI dalam melakukan evaluasi agar dapat segera mengambil keputusan yang efisien dan efektif, serta dapat berguna bagi seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam memperoleh gambaran mengenai arah dan fokus pelaksanaan kegiatan BPK RI dimasa mendatang.



Gambar 3. Pimpinan dan staf BPK Perwakilan Provinsi Maluku berfoto bersama

Pada akhirnya, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan terus melakukan penyempurnaan untuk dapat meningkatkan pencapaian kinerja dari tahun ke tahun sehingga dapat memberi kontribusi yang memadai bagi kinerja BPK RI secara keseluruhan (BPK *Wide*).

**TARGET PENCAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN
PERJANJIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU**

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp20.642.164.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp8.128.298.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	Rp12.513.866.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87,50%

**PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN
DENGAN CAPAIAN TIGA TAHUN TERAKHIR**

Indikator Kinerja Utama Periode Renstra 2016-2020		Capaian 2019	Indikator Kinerja Utama Periode Renstra 2020-2024		Capaian 2020	Capaian 2021
(1)		(2)	(4)		(6)	(7)
1	IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	55,29%	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	91,67%	88,46%
2	IKU 1.2 Presentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%
3	IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	102%	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	73,13%	69,41%
4	IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,71%	100,45%
5	IKU 2.1 Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	100%	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%
6	IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	30%	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,53%
7	IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,59	4,44
8	IKU 4.1 Tingkat Kematakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	8	Hasil Evaluasi AKIP	86,90	87,86
9	IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	24	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,71%	98,71%
10	IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	0	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%
11	IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	4,06	3,98
12	IKU 3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksaan BPK	4,75	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	90,24%	97,37%
13	IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,78%	86,01%
14	IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%				
15	3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	4,19				
16	3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,74				

Indikator Kinerja Utama Periode Renstra 2016-2020		Capaian 2019	Indikator Kinerja Utama Periode Renstra 2020-2024		Capaian 2020	Capaian 2021
(1)		(2)	(4)		(6)	(7)
17	3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%				
18	IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama dan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A				
19	IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,46%				
20	IKU 5.3 Jumlah Usulan Best-Practice	1				
21	IKU 5.4 Persentase Penyebaran (Penerapan) Best-Practice	100%				
22	IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	94%				
23	IKU 5.7 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	94,61%				
24	IKU 5.8 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2				
25	IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	95,56%				
26	IKU 6.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa)	93,48%				
27	IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	87,22%				

**PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN
DENGAN TARGET LIMA TAHUN**

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021 dengan Target Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	88,46%	88,46%
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	69,40%	92,53%
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,45%	100,45%
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,53%	100,53%
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,44	88,80%
Hasil Evaluasi AKIP	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	87,86	97,62%
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	99%	98,71%	99,71%
Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,98	104,74%
Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	97,37%	97,37%
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89%	86,01%	96,64%

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KINERJA ESELON II
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Skor
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	88,46%	88,46
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	69,40%	92,53
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,45%	100,45
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,53%	100
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,44	88,8
8	Hasil Evaluasi AKIP	87,00	87,86	100,99
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96,00%	98,71%	102,82
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	100,00%	100
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,98	104,74
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	97,37%	97,37
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87,50%	86,01%	98,30

**LAPORAN REALISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU**

Lampiran 5

Bulan : **Desember**

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	30.736.717.000	29.916.344.242	820.372.758
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian	30.736.717.000	29.916.344.242	820.372.758
1043.EAA	Layanan Perkantoran	8.738.517.000	8.218.229.617	520.287.383
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	8.738.517.000	8.218.229.617	520.287.383
001	Gaji dan Tunjangan	4.938.669.000	4.583.719.485	354.949.515
A	<u>Pembayaran gaji dan tunjangan</u>	4.938.669.000	4.583.719.485	354.949.515
511111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Gaji Pokok PNS	3.696.059.000	3.547.738.300	148.320.700
511119	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Pembulatan Gaji PNS	65.000	59.332	5.668
511121	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	216.183.000	202.687.906	13.495.094
511122	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Tunj. Anak PNS	55.703.000	53.065.349	2.637.651
511123	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Tunj. Struktural PNS	120.680.000	107.580.000	13.100.000
511125	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Tunj. PPh PNS	6.437.000	4.893.198	1.543.802
511126	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Tunj. Beras PNS	186.769.000	186.119.400	649.600
511129	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Uang Makan PNS	533.009.000	362.906.000	170.103.000
511151	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Tunjangan Umum PNS	28.784.000	27.780.000	1.004.000
512211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Uang Lembur	94.980.000	90.890.000	4.090.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.799.848.000	3.634.510.132	165.337.868
A	<u>Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan</u>	557.482.000	546.906.525	10.575.475
521111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Keperluan Perkantoran	138.348.000	128.088.594	10.259.406
524111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	419.134.000	418.817.931	316.069
B	<u>Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan</u>	38.400.000	38.400.000	0
521115	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	38.400.000	38.400.000	0
C	<u>Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia</u>	371.956.000	330.782.262	41.173.738
521131	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Operasional - Penanganan	39.175.000	39.042.320	132.680
521832	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Lainnya	58.485.000	58.415.252	69.748
522191	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Jasa Lainnya	68.796.000	60.899.690	7.896.310
522192	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	205.500.000	172.425.000	33.075.000
D	<u>Layanan Perkantoran Bidang Keuangan</u>	281.160.000	281.160.000	0
521115	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	281.160.000	281.160.000	0
E	<u>Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI</u>	2.550.850.000	2.437.261.345	113.588.655
521111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Keperluan Perkantoran	202.070.000	187.337.966	14.732.034
521113	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	90.100.000	90.096.710	3.290
521114	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17.700.000	2.187.000	15.513.000
521131	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Operasional - Penanganan	213.600.000	212.663.789	936.211
522111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Langganan Listrik	294.732.000	277.138.561	17.593.439
522112	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Langganan Telepon	48.000.000	38.332.466	9.667.534
523111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.377.931.000	1.354.738.836	23.192.164
523121	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	267.297.000	267.246.017	50.983
523123	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	39.420.000	7.520.000	31.900.000
1043.EAD	Layanan Sarana Internal	1.139.630.000	1.126.778.000	12.852.000
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	1.139.630.000	1.126.778.000	12.852.000
051	Tanpa Komponen	1.139.630.000	1.126.778.000	12.852.000
A	<u>Pengadaan Kendaraan Bermotor</u>	724.525.000	724.525.000	0
532111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	724.525.000	724.525.000	0
C	<u>Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran</u>	415.105.000	402.253.000	12.852.000
532111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	415.105.000	402.253.000	12.852.000
1043.EAE	Layanan Prasarana Internal	9.510.120.000	9.384.665.998	125.454.002
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	9.510.120.000	9.384.665.998	125.454.002
051	Tanpa Komponen	9.510.120.000	9.384.665.998	125.454.002
A	<u>Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan</u>	9.510.120.000	9.384.665.998	125.454.002
533111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.961.485.000	8.961.409.998	75.002
533121	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	548.635.000	423.256.000	125.379.000
1043.FAF	Pemeriksaan Keuangan	11.348.450.000	11.186.670.627	161.779.373
1043.FAF.045	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku	4.311.283.000	4.267.978.133	43.304.867
051	Menyusun Perencanaan Pemeriksaan	18.539.000	17.888.019	650.981
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	18.539.000	17.888.019	650.981
521219	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18.539.000	17.888.019	650.981
052	Melaksanakan Pemeriksaan	3.825.207.000	3.786.782.614	38.424.386
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	3.825.207.000	3.786.782.614	38.424.386
521219	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	921.670.000	919.708.500	1.961.500
522192	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	50.000.000	18.408.000	31.592.000
524111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.853.537.000	2.848.666.114	4.870.886
053	Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan	467.537.000	463.307.500	4.229.500
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	467.537.000	463.307.500	4.229.500
521219	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	108.415.000	107.668.500	746.500
524114	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	359.122.000	355.639.000	3.483.000

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1043.FAF.080	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi	133.854.000	133.854.000	0
051	Melaksanakan Pemeriksaan Banparpol	133.854.000	133.854.000	0
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	133.854.000	133.854.000	0
521219	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30.365.000	30.365.000	0
524111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103.489.000	103.489.000	0
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	31.274.000	21.966.250	9.307.750
051	Menyusun Bahan Rumusan Pendapat	31.274.000	21.966.250	9.307.750
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	31.274.000	21.966.250	9.307.750
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	1.980.000	1.980.000	0
521811	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6.000.000	5.992.250	7.750
524111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.294.000	13.994.000	9.300.000
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	157.806.000	149.252.763	8.553.237
051	Menyusun Sumbangan IHPS	157.806.000	149.252.763	8.553.237
A	<u>tanpa sub komponen</u>	157.806.000	149.252.763	8.553.237
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	11.616.000	11.477.184	138.816
521811	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.000.000	9.900.000	100.000
524111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	136.190.000	127.875.579	8.314.421
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	15.808.000	12.911.173	2.896.827
051	Menyusun Laporan Profil Entitas	15.808.000	12.911.173	2.896.827
A	<u>tanpa sub komponen</u>	15.808.000	12.911.173	2.896.827
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	5.808.000	2.987.523	2.820.477
521811	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.000.000	9.923.650	76.350
1043.FAF.178	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi	223.474.000	223.474.000	0
051	Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	223.474.000	223.474.000	0
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	223.474.000	223.474.000	0
521219	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	223.474.000	223.474.000	0
1043.FAF.219	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK	208.300.000	206.730.500	1.569.500
051	Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau	208.300.000	206.730.500	1.569.500
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	208.300.000	206.730.500	1.569.500
521219	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	208.300.000	206.730.500	1.569.500
1043.FAF.260	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku	2.999.937.000	2.999.157.300	779.700
051	Melaksanakan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan	2.999.937.000	2.999.157.300	779.700
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	2.999.937.000	2.999.157.300	779.700
521219	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	806.382.000	805.945.750	436.250
522192	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000	4.950.000	50.000
524111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.188.555.000	2.188.261.550	293.450
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	1.454.725.000	1.376.496.937	78.228.063
051	Melaksanakan Dukungan Manajemen Pemeriksaan	1.454.725.000	1.376.496.937	78.228.063
A	<u>Pelaksanaan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan</u>	245.000.000	170.151.000	74.849.000
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	27.000.000	27.000.000	0
521811	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.000.000	4.972.000	28.000
522192	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	138.600.000	102.929.000	35.671.000
524113	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.400.000	35.250.000	39.150.000
B	<u>Pelaksanaan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis Pemeriksaan</u>	812.118.000	811.938.584	179.416
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	43.956.000	43.932.750	23.250
524111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	768.162.000	768.005.834	156.166
C	<u>Pelaksanaan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</u>	350.215.000	347.071.353	3.143.647
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	36.405.000	36.044.300	360.700
521811	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.000.000	4.972.000	28.000
524111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	308.810.000	306.055.053	2.754.947
D	<u>Pelaksanaan Reviu atas Hasil Pemeriksaan</u>	22.496.000	22.468.000	28.000
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	17.496.000	17.496.000	0
521811	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.000.000	4.972.000	28.000
E	<u>Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen SIKAD</u>	24.896.000	24.868.000	28.000
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	19.896.000	19.896.000	0
521811	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.000.000	4.972.000	28.000
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.811.989.000	1.794.849.571	17.139.429
051	Tanpa Komponen	1.811.989.000	1.794.849.571	17.139.429
A	<u>Melaksanakan Layanan Tata Usaha</u>	25.660.000	25.227.050	432.950
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	4.860.000	4.533.900	326.100
521811	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.000.000	9.893.150	106.850
524113	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000	10.800.000	0
B	<u>Melaksanakan Layanan Kehumasan</u>	283.710.000	280.698.428	3.011.572
521111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Keperluan Perkantoran	13.560.000	13.448.000	112.000
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	91.720.000	90.669.922	1.050.078
521811	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15.000.000	14.886.900	113.100
522192	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	28.800.000	27.567.552	1.232.448
524111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	123.830.000	123.326.054	503.946
524113	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000	10.800.000	0
C	<u>Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia</u>	323.586.000	321.583.567	2.002.433
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	47.385.000	47.375.270	9.730

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
521811	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25.000.000	24.899.943	100.057
522151	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Jasa Profesi	2.000.000	1.550.000	450.000
522191	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Jasa Lainnya	8.000.000	8.000.000	0
522192	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17.700.000	17.279.735	420.265
524111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.101.000	205.078.619	1.022.381
524113	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.400.000	17.400.000	0
D	<u>Melaksanakan Layanan Keuangan</u>	331.376.000	327.126.136	4.249.864
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	36.688.000	36.687.699	301
521811	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	62.000.000	61.988.540	11.460
522192	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10.200.000	9.698.334	501.666
524111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	193.088.000	189.351.563	3.736.437
524113	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.400.000	29.400.000	0
E	<u>Melaksanakan Layanan Umum dan TI</u>	494.728.000	491.258.842	3.469.158
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	96.903.000	96.655.500	247.500
521811	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	71.508.000	71.483.500	24.500
522191	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Jasa Lainnya	1.442.000	0	1.442.000
522192	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	25.200.000	24.951.475	248.525
524111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	278.075.000	276.568.367	1.506.633
524113	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.600.000	21.600.000	0
F	<u>Melaksanakan Layanan Hukum</u>	201.481.000	200.781.927	699.073
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	26.655.000	26.486.902	168.098
521811	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22.000.000	21.833.350	166.650
522192	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	9.000.000	8.892.475	107.525
524111	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133.026.000	132.919.200	106.800
524113	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000	10.650.000	150.000
G	<u>Melaksanakan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK</u>	135.080.000	131.869.171	3.210.829
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	38.880.000	38.619.171	260.829
522141	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Sewa	63.200.000	60.400.000	2.800.000
524113	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.000.000	32.850.000	150.000
H	<u>Melaksanakan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko</u>	16.368.000	16.304.450	63.550
521211	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Bahan	10.368.000	10.364.950	3.050
521811	[00000000-A-0-0-061-21-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6.000.000	5.939.500	60.500